

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya di Riau. LAM Riau bukanlah organisasi yang berada di bawah pemerintah, namun menjadi mitra pemerintah dalam bidang pelestarian kebudayaan. LAM Riau didirikan oleh tokoh-tokoh kebudayaan Riau untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu Riau.

Suku Melayu secara suku bangsa merupakan suku terbesar populasinya dalam Provinsi Riau.¹ Jumlah penduduk Riau pada tahun 1971 adalah 1.423.289 juta jiwa², dan 967.395 jiwa adalah suku Melayu. Jumlah ini belum ditambahkan dengan masyarakat Melayu yang tinggal di daerah Kampar dan Indragiri Hulu. Daerah Kampar dan sebagian Indragiri Hulu mayoritas masyarakatnya menggunakan adat dan budaya Minangkabau dan Batak, namun masih ada beberapa puak Melayu didalamnya.³ Masyarakat suku bangsa Melayu sendiri banyak mendiami sepanjang pesisir pantai Riau dan pulau-pulau sekitarnya, serta di sepanjang aliran sungai Siak, Rokan, Kampar, dan sungai Indragiri.

¹ Melayu merupakan penamaan ilmiah untuk menyebut ras Paleo-Mongoloid yang mendiami sebagian besar Asia Tenggara. Kemudian Melayu dalam skripsi ini merupakan sub suku dari ras Paleo-Mongoloid tersebut yang juga disebut sebagai Melayu. Karena hal ini, penggunaan kata Melayu Riau dalam skripsi ini menunjukkan masyarakat Melayu yang mendiami wilayah Riau.

² Riau Dalam Angka 1971, Badan Pusat Statistik Riau, hal. 275

³ Puak adalah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menunjukkan keberadaan kelompok mereka, seperti puak Melayu Lingga, puak Melayu Brunei, dan sebagainya. Dalam KBBi, puak berarti kelompok atau kaum.

Dengan jumlah lebih dari separuh keseluruhan penduduk Riau dan mendiami sebagian besar wilayah Riau, maka orang Melayu menganggap sudah sewajarnya tata kelola dan pemerintahan Riau bercirikan kebudayaan Melayu. Sejak berdirinya provinsi Riau pada tahun 1958,⁴ kebudayaan Melayu belum diterapkan dalam pemerintahan Provinsi Riau, dan orang Melayu terpinggirkan dalam kehidupan di Riau, baik secara ekonomi maupun kebudayaan.

Banyak berbagai faktor yang membuat orang Melayu merasa terpinggirkan di Provinsi Riau, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu penyebab langsungnya adalah pada tahun 1963, Presiden Indonesia, Soekarno, yang akan berkunjung ke Pekanbaru, hendak disambut dan disiapkan dengan upacara adat dan budaya kesenian Melayu oleh seniman dan budayawan Riau. Akan tetapi, rencana ini mendapat tentangan dari para pejabat Kantor Gubernur Riau. Akhirnya terjadilah perdebatan antara budayawan dan seniman Riau yang terdiri dari Tenas Effendy, O.K. Nizami Jamil, Soeman Hs, Djohan Syarifuddin, dan Idrus Tintin, dengan pejabat kantor Gubernur Riau yang dipimpin oleh Sekretaris Gubernur, Datuk Mangkuto Ameh.⁵ Kemudian, beberapa faktor tidak langsung yang dirasakan oleh seniman dan budayawan Riau disebabkan oleh politik sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang.

Pada tahun 1959, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau masih merupakan satu Provinsi, dengan enam kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kotamadya Pekanbaru.

⁵ O.K. Nizami Jamil, *Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau*, (Pekanbaru: Sukabina, 2008), hlm. 9.

hal ini Orde Baru. Politik Orde Baru membuat identitas nasional disatukan, seperti misalnya penggunaan batik, kebaya, maupun sanggul. Padahal pakaian Melayu tidaklah demikian, hal ini membuat keinginan seniman dan budayawan Melayu Riau untuk menonjolkan identitas Melayu di Riau semakin kuat.

Keadaan kebudayaan Melayu Riau yang terpinggirkan dan masih belum mendapatkan sambutan yang baik dari pemerintah menimbulkan keprihatinan budayawan Riau. Penolakan dari staf gubernur Riau dalam penyambutan tamu penting menggunakan budaya dan kesenian Melayu adalah contohnya. Jika tidak dilakukan suatu gerakan untuk pelestarian, budaya Melayu dikhawatirkan akan secara perlahan-lahan mengalami kemunduran. Tokoh-tokoh budayawan Riau seperti O.K. Nizami Jamil dan Tenas Effendy kemudian berusaha untuk membentuk suatu wadah perjuangan khusus untuk kebudayaan Melayu. Wadah perjuangan Melayu inilah yang nanti akan menjadi ujung tombak orang Melayu dalam tujuan pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu di Riau.

Masa pemerintahan Gubernur Arifin Ahmad (1966-1978), keinginan untuk membentuk wadah perjuangan kebudayaan Melayu menjadi kenyataan. Gubernur Arifin Ahmad yang merupakan putera asli Riau ini sangat memperhatikan kebudayaan Melayu. Gubernur meminta O.K. Nizami Jamil untuk membentuk suatu lembaga adat untuk menyatukan semua adat yang ada di Riau. O.K. Nizami Jamil kemudian mengunjungi pemuka adat dan para pembesar bekas kerajaan-kerajaan yang ada di Riau untuk meminta dukungan dan mengantarkan undangan dari Gubernur. Pada tanggal 6 Juni 1970, pemuka adat melakukan pertemuan di kantor Gubernur Riau atas undangan dari Gubernur Riau. Pertemuan

tersebut dipimpin langsung oleh Wan Abdul Rahman yang merupakan perpanjangan tangan Gubernur Riau. Pertemuan di kantor Gubernur Riau ini kemudian melahirkan sebuah organisasi dengan nama “Lembaga Adat Daerah Riau”.⁶

Pada tanggal 9 September 1970, Lembaga Adat Daerah Riau diresmikan oleh Gubernur Riau Arifin Ahmad, bertempat di Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru.⁷ Keberadaan Lembaga Adat Daerah Riau adalah untuk membuat suatu gerakan untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu di Riau. Lembaga Adat Daerah Riau pada tahun 1994 kemudian berubah nama menjadi Lembaga Adat Melayu Riau.

Bahasa dan kebudayaan Melayu mulai dikembangkan dengan adanya pelajaran Muatan Lokal Arab Melayu⁸ dan Budaya Melayu Riau (BMR),⁹ serta hukum adat Melayu Riau¹⁰ dalam kurikulum pendidikan di Riau. Corak bangunan pemerintahan Riau juga telah menggunakan arsitektur Melayu.¹¹ Bangunan di Riau, terutama bangunan pemerintah harus menggunakan corak dan ragam hias Melayu. Pakaian khas Melayu juga telah diterapkan dalam pemerintahan dan pendidikan di Riau, dan digunakan sekali seminggu pada hari jum'at.¹²

⁶ O.K. Nizami Jamil, *op.cit*, hlm. 14.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13-19.

⁸ SK Gubernur Riau Nomor 46/11/1989 Tentang Pedoman Tulisan Arab Melayu untuk Sekolah Dasar di Propinsi Riau.

⁹ Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

¹⁰ Wawancara dengan Suwardi MS pada tanggal 11 Agustus 2016 di Pekanbaru.

¹¹ Marrio Kisaz, *Kombinasikan Kultur dan Infrastruktur Modern*, <http://riaupos.co/15027-arsip-kombinasikan-kultur-dengan-infrastruktur-modern.html#.VwOLptllPIU>, diakses tanggal 05 April 2016.

¹² Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan hasil dialog antara tokoh LAM Riau dan pemerintah Riau telah mencanangkan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.¹³

Perjalanan mulai dari pembentukan hingga kiprah dan andil Lembaga Adat Melayu Riau dalam menghadapi permasalahan budaya masyarakat Riau yang sangat beragam dan rumit tentu saja tidak mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan impian Lembaga Adat Melayu Riau. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis Lembaga Adat Melayu Riau (selanjutnya disingkat LAM Riau) dalam pelestarian kebudayaan Melayu Riau.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Usaha Lembaga Adat Melayu Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Riau menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Kondisi sosial budaya Riau yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini membuat usaha pelestarian kebudayaan Melayu oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) sangat menarik untuk ditulis.

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi Riau 2001-2005.

Suwardi MS (Tokoh pengurus LAM Riau sekaligus seorang sejarawan dan budayawan Riau) dalam sebuah wawancara pada tanggal 11 Agustus 2016 di Pekanbaru mengatakan bahwa Perda Riau ini ada berkat lobi dan dialog anatara tokoh-tokoh LAM Riau diantaranya Wan Ghalib, Tenas Effendy, dan Suwardi MS dengan anggota DPRD Riau dan Gubernur Riau, Saleh Djasit. Para tokoh ini menginginkan adanya perlindungan dan kekuatan hukum untuk menjadikan kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan yang ada di Riau. Usaha para tokoh ini membuahkan hasil dengan terbitnya Perda No. 3 Tahun 2002 tentang visi Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu Asia Tenggara 2020.

Untuk lebih fokus terhadap penulisan maka ruang lingkup yang akan diteliti dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut :

- 1) Bagaimana kondisi sosial budaya Riau yang melatar belakangi pendirian LAM Riau?
- 2) Bagaimana struktur organisasi dan tokoh-tokoh pendiri LAM Riau?
- 3) Bagaimana usaha LAM Riau dalam melakukan pelestarian kebudayaan Melayu di Riau?

Penelitian ini bertempat di kota Pekanbaru, kabupaten Siak Sri Indrapura, dan Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan balai adat Riau LAM Riau berada di kota Pekanbaru, serta di Kampar untuk mewakili kebudayaan Minangkabau di Riau dan di Siak untuk mewakili masyarakat yang masih mengang kental kebudayaan Melayu. Untuk batasan temporal, penulis mengambil batas dari tahun 1970 sampai tahun 2012. Tahun 1970 adalah tahun Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dibentuk dan diresmikan oleh Gubernur Riau, sementara tahun 2012 merupakan tahun terpilihnya kepengurusan yang keenam dan akan berjalan hingga sekarang, sehingga belum bias dikaji secara mendalam.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diberi judul “Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu di Riau 1970-2012”. Hasil penelitian ini

diharapkan mampu mengungkap perjalanan sebuah lembaga yang disebut LAM Riau, beserta kiprah tokoh-tokoh budayawan Melayu yang ada didalamnya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu Riau. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Menjelaskan faktor yang melatar belakangi pembentukan LAM Riau.
2. Menjelaskan struktur organisasi dan kepengurusan LAM Riau.
3. Menjelaskan usaha-usaha pelestarian kebudayaan Melayu yang dilakukan oleh LAM Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, ada beberapa sumber buku dan skripsi yang dijadikan pijakan oleh penulis, baik dalam hal penulisan maupun sebagai sumber data.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) adalah suatu badan mitra Pemerintah Riau dalam bidang kebudayaan. Sumber yang menulis tentang LAM Riau adalah buku terbitan oleh LAM Riau sendiri dengan judul *Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau*, yang ditulis oleh tim penulis LAM Riau. Dalam buku ini, terdapat informasi lengkap mengenai program kerja dan kepengurusan LAM Riau.

Buku yang diterbitkan LAM Riau ini memuat tentang kepengurusan LAM Riau dari masa ke masa, yang mencakup susunan kepengurusan dan program kerja dari tahun 1970 hingga 2012. Buku ini juga memuat tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LAM Riau.

Selain buku yang diterbitkan oleh LAM Riau, skripsi dari Puti Bungsu yang berjudul *Peranan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau* menjadi penting dalam penulisan ini. Skripsi dari Puti Bungsu ini berjudul tentang peranan LAM Riau, namun isi penelitiannya memuat tentang administrasi organisasi LAM Riau komtemporer. Penelitian ini mampu membuat penulis memahami administrasi dalam organisasi LAM Riau, namun tidak terdapat peranan LAM Riau dalam pelestarian kebudayaan daerah Riau.

Skripsi Yesmawati yang berjudul *Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat 1966-2004* merupakan pedoman penting bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Yesmawati menulis sebuah lembaga adat yang sifatnya sama dengan LAM Riau. Sebagai organisasi kebudayaan, LKAAM bergerak dalam pelestarian kebudayaan Minangkabau di Sumatera Barat, dan LAM Riau bergerak dalam pelestarian kebudayaan Melayu dan kebudayaan lain yang ada di Riau, mengingat bahwa masyarakat Riau lebih majemuk dari masyarakat Sumatera Barat. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara LAM Riau dan LKAAM, yaitu LKAAM dibentuk oleh militer dan tidak hanya di bidang

kebudayaan, LKAAM juga bergerak dibidang politik, suatu hal yang belum dilakukan oleh LAM Riau.¹⁴

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini berfokus terhadap sejarah lembaga kebudayaan, yaitu LAM Riau, yang dalam hal ini merupakan organisasi di Riau yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu di Riau. Hal pertama yang harus diketahui adalah pengertian dan pemahaman tentang Melayu itu sendiri. Terdapat banyak pendapat mengenai asal kata Melayu. Seorang cendekiawan Melayu bernama Burhanuddin Elhulaimy yang juga pernah menjadi ketua umum Partai Islam Tanah Melayu dalam bukunya *Asas Falsafah Kebangsaan Melayu*, mencatat beberapa istilah kata tersebut. Ada pendapat yang menyatakan kata Melayu berasal dari kata “*mala*”, yang berarti kata mula, dan “*yu*”, yang berarti negeri. Kemudian dalam bahasa Tamil kata Melayu berarti tanah tinggi atau bukit. Disamping itu kata Malay juga berarti hujan. Semua kata itu dapat dirangkum, bahwa Melayu adalah negeri yang mula-mula didiami, dan mendapat banyak hujan. Sangat sesuai dengan kondisi geografis Asia Tenggara yang mempunyai curah hujan yang cukup, atau dengan pengertian lain, orang Melayulah yang pertama kali mendiami wilayah nusantara.¹⁵

Riau adalah sebuah wilayah administratif di tengah pulau Sumatera yang berbentuk provinsi, dan beribukota di Pekanbaru. Asal kata penamaan Riau

¹⁴ Yesmawati, “Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat 1966-2004”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2006).

¹⁵ UU Hamidy, *op. cit*, hlm. 3.

sendiri ada empat pendapat. Pertama, dari kata Portugis, *rio*, yang berarti sungai. Pada tahun 1514, terdapat sebuah ekspedisi militer Portugis yang menelusuri sungai Siak, dengan tujuan mencari lokasi kerajaan yang mereka yakini ada disekitar kawasan tersebut, serta mengejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang mengundurkan diri menuju Kampar setelah kejatuhan Kesultanan Malaka.¹⁶ Pendapat kedua berasal dari kata *riahi* yang berarti air laut, yang diduga berasal dari cerita seribu satu malam. Hal ini berkaitan dengan bahwa masyarakat Melayu banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil lautan. Pendapat ini juga pernah dikemukakan oleh Oemar Amir Husin, seorang tokoh masyarakat dan pengarang Riau asal Kuantan Singingi dalam salah satu pidatonya mengenai terbentuknya provinsi Riau. Pendapat ketiga diangkat dari kata *rioh* atau *riuh* berasal dari penamaan rakyat setempat yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja, yang mulai dikenal setelah Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan Riau dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719.¹⁷ Pendapat keempat adalah penamaan dari masyarakat Kuantan Singingi yang menyebut kata *Meriau*, yang berarti menangkap ikan dalam jumlah besar yang dihadiri oleh banyak orang. Di Siak juga ada kata *Meriau*, yang berarti musim ikan bermain-main, sehingga mudah untuk ditangkap. Dari kata *meriau* ini kemudian menjadi nama Riau.¹⁸

Melayu Riau menurut Uu Hamidy (2014) adalah manusia yang bermigrasi dari Yunan menuju nusantara dan mendiami wilayah pesisir dan tepian

¹⁶ Elmustian Rahman, dkk, *Alam Melayu, Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*, (Pekanbaru: Unri Press, 2003), hlm. 14.

¹⁷ UU Hamidy, *op., cit*, hlm. 1.

¹⁸ Asal-usul Nama Riau, [http:// www.kebudayaan.kemendikbud.go.id / bpnbtanjungpinang / 2014 / 06 / 08 / asal-usul-nama-riau /](http://www.kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2014/06/08/asal-usul-nama-riau/), diakses tanggal 04 April 2016.

sungai di Riau, yang mendapatkan sentuhan Islam (Deutro Melayu)¹⁹. Seorang ahli geografi sejarah, N. Daldjoeni dalam bukunya *Geografi Kesejarahan II Indonesia* juga menyebutkan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia termasuk ras Paleo-mongoloid, yang disebut oleh ahli sebagai ras Melayu.²⁰ Ini berarti, secara ras, semua penduduk Asia Tenggara adalah Melayu, dan Melayu Riau yang terdapat dalam skripsi ini hanyalah salah satu dari sub suku Melayu tersebut, merujuk ke masyarakat yang tinggal di wilayah administratif Provinsi Riau. Teori ini juga di sebutkan dan didukung oleh James T. Collins. Dalam bukunya yang berjudul *Bahasa Melayu Bahasa Dunia*. Collins menyebutkan bahwa penduduk penutur bahasa Melayu berasal dari Cina dan bermigrasi ke Riau dan Kepulauan Pasifik, pantai Afrika dan Madagaskar serta sepuluh ribu kepulauan yang ada di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, Bahasa Melayu ini berkembang menjadi 1000 bahasa.²¹ Walaupun ada perbedaan Melayu Muda (Deutro Melayu) dengan Melayu Tua (Proto Melayu), secara kebiasaan tidak ada beda antara keduanya. Mereka adalah manusia perairan (maritim) yang menyukai air laut dan sungai. Oleh karena itu, sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Riau yang berdomisili di daerah perairan, baik itu di kepulauan atau pesisir seperti Bengkalis, Rupat, dan Meranti, maupun yang ada di daratan, seperti masyarakat Siak di tepian sungai Siak. Masyarakat Kampar dan Kuantan Singingi kemudian

¹⁹ Kata Deutro Melayu seperti yang di tuliskan oleh Mohammed Anwar Omar Din dalam jurnalnya yang berjudul *Asal-usul Orang Melayu: Menulis Semula Sejarahnya*, dikenalkan pertama kali oleh Robert Heine van Geldern, seorang ilmuwan Yahudi berkebangsaan Belanda. Kata Deutro diambil dari dari kitab Yahudi yang berjudul *Deutronomy*, yang mana Deutro ini berarti penghijrah.

²⁰ N. Daldjoeni, *Geografi Kesejarahan II Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 1-7.

²¹ Collins, James. T, *Bahasa Melayu Bahasa Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005), hlm. 1.

disebut sebagai Melayu Kuantan dan Melayu Kampar. Masyarakat inilah yang tinggal di Riau dan kemudian disebut dengan Melayu Riau. Jika dilihat secara geografis, kota-kota lama yang ada di Riau memang kesemuanya terletak di tepian sungai, atau berada tidak terlalu jauh dari pesisir pantai. Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi terletak di tepi sugai Siak, begitu juga dengan kota Siak Sri Indrapura. Kota-kota lain juga berada di tepian sungai atau pesisir, seperti kota Teluk Kuantan di tepi sungai Kuantan, dan kota Bengkalis di pesisir pulau Bengkalis.

Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan Koenjtaraningrat lebih menyukai istilah pranata dan membaginya berdasarkan kebutuhan hidup manusia, seperti pranata pendidikan atau pranata sosial. Kemudian Adat menurut KBBI adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Dengan demikian, Lembaga Adat adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengkaji dan mempelajari tentang suatu kebudayaan, yang dalam kasus ini adalah kebudayaan Melayu Riau.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengatur tentang Lembaga Adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan

kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.²² Dengan itu, maka Lembaga Adat Melayu Riau adalah organisasi yang melakukan kegiatan pelestarian sejarah dan budaya Melayu yang ada di Riau.

Jika mengambil teori pandangan umum seperti yang dikemukakan oleh Koenjtaraningrat dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (1974), kebudayaan lebih menonjol dilihat sebagai kesenian, bahasa, dan sistem pengetahuan atau teknologi. Sebagai badan yang bertugas melestarikan kebudayaan Melayu, maka LAM Riau akan memperjuangkan kesenian Melayu Riau, bahasa Melayu, serta sistem pengetahuan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam masyarakat Melayu Riau. Namun jika dilihat dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2012, peranan LAM Riau adalah menggali adat-adat yang ada diseluruh wilayah Riau, baik itu dalam bentuk bahasa, kesenian, mata pencaharian, teknologi, serta bentuk lainnya, baik dalam bentuk abstrak maupun dalam bentuk fisik. Adat yang ada dalam masyarakat ini kemudian di bina dan dipelihara hingga berkembang. Tujuan akhirnya kemudian adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur Adat dan Budaya Melayu Riau sebagai landasan memperkuat dan mengekalkan jati diri masyarakat Melayu Riau.

Pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu oleh LAM Riau mencakupi unsur kebudayaan benda dan tak benda. Unsur benda yang mendapatkan perhatian cukup serius dari LAM Riau antara lain adalah pakaian adat Melayu, bentuk dan ragam arsitektur Melayu, serta tulisan aksara Melayu.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Sedangkan unsur tak benda, LAM Riau berfokus untuk pengembangan dan pelestarian bahasa, seni tari, serta upacara adat Melayu.

Perjuangan masyarakat LAM Riau untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan memperlihatkan keberadaan budaya Melayu Riau di tanah sendiri dapat di lihat dari perspektif politik kebudayaan. Politik kebudayaan adalah tujuan dan prosedur-prosedur politik harus diterapkan atas dasar kebudayaan.²³ Sebelum otonomi daerah, kekuatan pusat (orde baru) sangat kuat yang menyebabkan semua kebijakan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah sangat harus demi kepentingan nasional. Untuk menunjukkan keberadaan dirinya, masyarakat dan elit politik Riau melawan kebijakan politik pusat dengan suatu produk kebudayaan Melayu di Riau. Produk kebudayaan itu bisa berbentuk kebijakan daerah berdasarkan budaya Melayu, sehingga mau tidak mau pemerintah pusat harus mengakui eksistensi politik dan budaya daerah. Pentingnya budaya Melayu bagi masyarakat Melayu Riau muncul karena berbagai makna yang dikandungnya, terutama makna identitas, sebagai kebutuhan yang mutlak harus dimiliki. Menurut Fromm dalam Noor Efni Salam (Strategi Komunikasi dan Budaya Dalam Mempertahan Identitas Melayu Riau), identitas sama dengan integritas. Seseorang yang tidak mempunyai identitas yang jelas atau kabur dapat dikatakan sebagai individu yang tidak mempunyai integritas yang kuat. Jika suatu daerah tidak mempunyai suatu identitas, keberadaan suatu daerah tersebut

²³ Budi Mulyawarman, *Budaya Politik Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Politik*, Jurnal ASPIRASI, volume 5 nomor 2 Februari 2015, hlm. 1.

akan sulit didapati.²⁴ Sikap ini terlihat dari pengelompokan dan pemberian identitas Melayu oleh LAM Riau kepada siapa saja yang beragama Islam dan memakai kebudayaan Melayu di Riau.

Dengan diakuinya identitas suatu daerah, maka mudah bagi etnis daerah tersebut mendapatkan kekuasaan baik dalam bentuk gubernur, bupati, ataupun walikota untuk daerah tersebut. Hal ini adalah efek pengakuan pusat terhadap etnis daerah. Dalam kasus Riau pun demikian, dengan diakuinya Riau sebagai tanah orang Melayu, maka orang Melayu Riau mendapatkan kesempatan yang besar untuk bangkit dan mengambil alih daerahnya (yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat).²⁵

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap yaitu : 1. Heuristik (pengumpulan sumber), 2. Kritik (pengujian dan analisa terhadap sumber dan bahan yang digunakan), 3. Interpretasi (penafsiran fakta sejarah melalui sumber), 4. Historiografi (penulisan sejarah).

Dalam tahap heuristik tidak hanya melakukan pengumpulan data tetapi juga sekaligus mengklasifikasikan dan menyusun data yang diperoleh. Tahap pengumpulan bahan dan sumber dilakukan melalui dua cara yaitu penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian perpustakaan dilakukan untuk

²⁴ Noor Efni Salam. *Strategi Komunikasi dan Budaya Dalam Mempertahankan Identitas Melayu Riau*. Repository Universitas of Riau, <http://repository.unri.ac.id/>, diakses tanggal 24 April 2016.

²⁵ Muhtar Habodin, *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012, hlm. 118.

mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian di berbagai perpustakaan. Diantara perpustakaan tersebut adalah Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Wilayah Riau Soeman Hs, dan Perpustakaan LAM Riau. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara tidak berstruktur (mendalam) dengan narasumber yang terkait langsung dengan topik maupun orang terdekat, orang yang menyaksikan dan orang yang mengetahui materi dari penelitian tersebut. Narasumber yang dimaksud adalah masyarakat biasa dan pemerintah daerah, serta tokoh-tokoh dalam LAM Riau.

Tahap kedua adalah melakukan verifikasi atau kritik terhadap sumber yang telah didapatkan dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber yang ada sehingga mendapat suatu fakta. Kritik yang dilakukan terdiri dari kritik intern dan ekstern. Kritik dilakukan terhadap sumber-sumber yang didapatkan baik secara tertulis seperti arsip maupun wawancara dengan sejumlah informan agar mendapatkan hasil yang objektif. Tahap ketiga adalah merangkai fakta-fakta yang telah didapat menjadi satu kesatuan rangkaian pengertian. Selanjutnya tahap terakhir adalah penulisan yang akan menguraikan temuan hasil penelitian yang dikenal dengan istilah historiografi. Metode penulisan diarahkan kepada penulisan sejarah prosesusual yang menggambarkan sejarah sebagai proses, yang mencakup uraian deskriptif naratif atau cerita.²⁶

²⁶ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 121-163.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dilakukan secara sistematis dan dibagi kedalam lima bab. Bab I adalah pengantar yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang kondisi geografis daerah Provinsi Riau. Selain itu, bab II juga berisi kondisi sosial budaya dan gambaran umum Provinsi Riau. Bab III berisi perjalanan organisasi LAM Riau dari tahun 1970-2011. Bab IV berisi langkah-langkah dan gerakan pelestarian kebudayaan Melayu oleh LAM Riau, dimulai awal pembentukannya tahun 1970 hingga tahun 2012.

Bab V berisikan tentang peranan dan kiprah LAM Riau dalam kehidupan masyarakat Riau, baik itu tokoh-tokoh LAM Riau maupun kiprah LAM Riau tingkat kabupaten yang ada di Riau. Bab VI merupakan kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya serta daftar pustaka dan lampiran arsip-arsip.

